

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan sumber penting sebagai panduan dan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Dengan mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami hasil-hasil yang telah dicapai dan menggunakan mereka sebagai titik perbandingan untuk studi saat ini. Untuk memberikan konteks dan landasan bagi studi ini, berikut disajikan ringkasan beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya:

2.1.1 Riana Herdiani Dewi (2020) Tentang “Efektivitas Program Pembinaan Bagi Narapidana Di Rutan Kelas 1 Kota Bandung” Politeknik

Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sebagai pendekatannya. Dalam metode ini, data dikumpulkan dan dianalisis secara numerik untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel dengan presisi dan menghasilkan data yang objektif dan dapat diukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Karakteristik Responden, Efektivitas pembinaan Rohani, Efektivitas pembinaan Kesehatan jasmani, dan efektivitas pembinaan keterampilan di Rutan Kelas 1 Kota Bandung.

Hasil dari Penelitian ini penulis menyatakan usulan program untuk pemecahan masalah yang terjadi di Rutan Kelas 1 Kota Bandung yaitu “Peningkatan Pembinaan Keterampilan Bagi Warga Binaan Melalui Manajemen Kewirausahaan”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan program pembinaan

keterampilan untuk para narapidana di Rutan Kelas 1 Kota Bandung dengan diharapkan program ini dapat meningkatkan motivasi, potensi, dan pengetahuan serta wawasan salam berwirausaha.

2.1.2 Parlindungan Marpaung (2019) Tentang “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Sosial dan Pembinaan Terhadap Perilaku Anak Asuh” Universitas Darma Agung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan 15 informan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dan hasil penelitian menegaskan bahwa anak-anak memiliki peran penting sebagai investasi untuk masa depan bangsa dan perlu dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Pelayanan sosial dan pembinaan perilaku anak asuh harus menjadi prioritas utama. bagi pengelola panti asuhan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa anak-anak menerima perlindungan dan pembinaan yang memadai guna menjamin masa depan yang cerah dan berkelanjutan bagi bangsa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki karakter, martabat, pengetahuan luas, keterampilan, inovasi, dan moral yang baik.

Efektivitas adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi. Efektivitas dianggap berhasil ketika tujuan atau target tersebut tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan sosial secara optimal adalah kekurangan dana dan keterbatasan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program yang dirumuskan oleh pengelola panti asuhan. Meskipun demikian, pihak pengelola

panti asuhan terus berupaya maksimal menciptakan anak-anak berkualitas. Mereka terus melaksanakan program-program yang telah dirumuskan sebelumnya oleh yayasan dengan tujuan untuk mengembangkan anak-anak yang mandiri, terampil, inovatif, kreatif, berpengetahuan luas, dan bermoral baik. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah pendanaan serta kurangnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai.

2.1.3 Fitria Monica Manulang (2019) tentang “Efektivitas Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy Kota Bandung” Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 65 orang sebagai sampel. Teknik pengumpulan data meliputi angket/kuesioner, wawancara tidak terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini didorong oleh masalah yang ada di Lapas Klas IIA Banceuy, Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai “Efektivitas Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy Kota Bandung”

Hasil dari penelitian ini berfokus pada efektivitas program pembinaan berada pada Tingkatan kurang efektif. Dimana aspek yang diukur adalah tugas atau fungsi, aspek perencanaan, aspek ketentuan, dan aspek tujuan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

PENELITIAN	PENELITIAN 1	PENELITIAN 2	PENELITIAN 3
Nama dan Tahun Terbit	Riana Herdiani Dewi (2020)	Parlindungan Marpaung (2019)	Fitria Monica Manulang (2019)
Judul	Efektivitas Program Pembinaan Bagi Narapidana di Rutan Kelas 1 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Sosial dan Pembinaan Terhadap Perilaku Anak Asuh	Efektivitas Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Banceuy Kota Bandung
Metode	Kuantitatif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Hasil	Hasil dari Penelitian ini penulis menyatakan usulan program untuk pemecahan masalah yang terjadi di Rutan Kelas 1 Kota Bandung yaitu “Peningkatan Pembinaan Keterampilan Bagi Warga Binaan Melalui Manajemen Kewirausahaan”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan program pembinaan keterampilan untuk para narapidana di Rutan Kelas 1 Kota Bandung dengan diharapkan program ini dapat	Berdasarkan hasil penelitian ini Panti Asuhan Keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan sosial yang optimal, yang berdampak pada terbatasnya fasilitas yang mendukung implementasi program-program yang dirumuskan oleh pengelola panti asuhan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat berjalan dengan maksimal, menghambat upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anak-anak asuh di panti	Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas program pembinaan berada pada Tingkatan kurang efektif. Dimana aspek yang diukur adalah tugas atau fungsi, aspek perencanaan, aspek ketentuan, dan aspek tujuan.

	meningkatkan motivasi, potensi, dan pengetahuan serta wawasan salam berwirausaha.	tersebut.	
Persamaan	Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yang terletak pada penggunaan variabel yang identik serta penerapan metode penelitian yang seragam.	Persamaan terletak pada Variabel	Persamaan terletak pada Variabel dan metode penelitian
Perbedaan	Perbedaan yang signifikan terdapat pada tempat dilakukannya studi dan objek yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.	Perbedaan terletak pada Lokasi Penelitian metode penelitian	Perbedaan terletak pada Lokasi Penelitian,

Sumber : Riana Herdiani Dewi, Parlindung Marpaung, Fitria Monica Manulang.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui perbedaan dan persamaan dari tiga penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti. Penelitian pertama yaitu menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan hasil menyatakan usulan program untuk pemecahan masalah yang terjadi di Rutan Kelas 1 Kota Bandung yaitu “Peningkatan Pembinaan Keterampilan Bagi Warga Binaan Melalui Manajemen Kewirausahaan”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan program pembinaan keterampilan untuk para narapidana di Rutan Kelas 1 Kota Bandung dengan diharapkan program ini dapat meningkatkan motivasi, potensi, dan pengetahuan serta wawasan salam berwirausaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

tersebut adalah variabelnya yaitu Efektivitas dan Perbedaannya terletak pada Lokasi Penelitian dan sasaran penelitian. Penelitian Kedua menggunakan pendekatan Kualitatif dengan hasil Kurang efektif karena Keterbatasan dana merupakan faktor utama yang menghambat panti asuhan dalam memberikan pelayanan sosial secara optimal, sementara keterbatasan fasilitas juga mempengaruhi Pelaksanaan program yang telah dirumuskan oleh pengelola panti asuhan terus dilakukan. Meskipun demikian, pihak panti asuhan tetap berupaya keras untuk membentuk anak-anak yang berkualitas. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut dalam hal variabel yang digunakan, tetapi berbeda dalam lokasi penelitian dan metode yang diterapkan. Penelitian ketiga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil efektivitas program pembinaan berada pada Tingkatan kurang efektif. Dimana aspek yang diukur adalah tugas atau fungsi, aspek perencanaan, aspek ketentuan, dan aspek tujuan. Persamaan pada penelitian ini adalah Variabelnya mengenai Efektivitas dan untuk perbedaannya terdapat pada Lokasi penelitian.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Kajian tentang Efektivitas

2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Schemerhorn (2015:73) “Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian hasil atau output yang dievaluasi dengan membandingkan *output* yang seharusnya terjadi dengan output yang benar-benar tercapai.” Ini dianggap berhasil jika *output* melebihi dari yang sebenarnya. Efektivitas juga merujuk pada hubungan antara hasil yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi hasil tersebut terhadap pencapaian sasaran,

semakin tinggi tingkat efektivitas unit tersebut. (Supriyono, 2000:29). Dalam konteks ini, efektivitas juga merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan akhir yang ingin dicapai, melibatkan penggunaan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (Steers, 2008:55). Menurut Bedjo (dalam Mayandri, 2017:4), Efektivitas mencerminkan seberapa baik pekerjaan dilakukan dan sejauh mana hasilnya sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tercapai ketika pekerjaan diselesaikan sesuai perencanaan dalam hal waktu, biaya, dan kualitasnya (Ravianto dalam Masruri, 2014). Kurniawan (2005:109) menggambarkan efektivitas sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau program tanpa adanya tekanan atau ketegangan yang mengganggu pelaksanaannya.

Efektivitas dapat diartikan sebagai kaitan antara hasil yang dicapai dan tujuan atau sasaran yang ingin diraih. Semakin besar kontribusi atau dampak dari hasil tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, semakin tinggi tingkat efektivitas dari suatu organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas diukur dari sejauh mana output yang dihasilkan mampu mendukung atau mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dapat memenuhi atau melampaui harapan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif apabila output yang dihasilkan memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Mahmudi (2005:92) menekankan bahwa efektivitas berfokus pada hasil

(outcome), di mana sebuah program atau kegiatan dianggap efektif jika *output* yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang telah diharapkan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan timbal balik antara *output* yang dihasilkan dan tujuan yang ingin dicapai dalam konteks efektivitas suatu program atau kegiatan.

Gibson dkk., dalam Jauhar (2013:248), mendefinisikan efektivitas sebagai penilaian atas hasil yang dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi. Tingkat efektivitas meningkat seiring dengan kedekatan antara pencapaian aktual dan standar yang diharapkan. Dalam konteks program, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjalankan program-program sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Cambell (1989:47) memperluas definisi ini dengan menjelaskan efektivitas secara menyeluruh sebagai tingkat keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas utamanya atau mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mahsun (2006) “Sumber daya manusia adalah faktor krusial dalam mencapai efektivitas sebuah organisasi, yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Upaya untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan sikap tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugas, sehingga efektivitas organisasi dapat meningkat”. Efektivitas merujuk pada hubungan antara hasil yang dihasilkan oleh organisasi dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Secara pokok, efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan atau target kebijakan. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif jika dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang cerdas dan efisien. Menurut Mahsun (2006), efektivitas adalah ukuran kesuksesan sebuah organisasi dalam

mencapai tujuannya. Ketika sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara efektif.

Berdasarkan berbagai pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolok ukur keberhasilan suatu program dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengingat bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan sasaran utama pembangunan. Penilaian tingkat kesejahteraan ini dapat dilakukan dengan mengamati beberapa parameter tertentu, antara lain tingkat penghasilan, kualitas pendidikan, serta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 1989:48).

2.2.1.2 Ukuran Efektivitas

Menurut Gibson (1997:32) mengemukakan mengenai efektivitas adalah sebagai berikut.

“Efektivitas sebuah organisasi dapat dinilai melalui kriteria jangka pendek seperti tingkat produksi, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan, serta kriteria jangka panjang seperti keberlanjutan. Dalam perspektif waktu, efektivitas sebuah organisasi diukur berdasarkan produktivitasnya, tingkat kepuasan stakeholders, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, dan kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya.”

Siagian (1978) menyebutkan bahwa ada delapan kriteria atau ukuran untuk mengevaluasi apakah suatu organisasi berhasil mencapai tujuan secara efektif. Kriteria-kriteria tersebut mencakup kejelasan dalam tujuan yang hendak dicapai, strategi yang terperinci untuk mencapai tujuan tersebut, proses analisis dan formulasi kebijakan yang teliti, perencanaan yang terstruktur, penyusunan program kerja yang sesuai, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan kontrol yang efektif. 8 (delapan) Kriteria tersebut sebagai berikut :

1. Klarifikasi tujuan yang ingin dicapai bertujuan agar karyawan dapat menjalankan tugas mereka dengan jelas menuju tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Penjabaran metode untuk mencapai target merujuk pada penyusunan langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar tim pelaksana dapat dengan mudah memahami dan menjalankan tugas mereka dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi tanpa menghadapi hambatan yang berarti.
3. Proses analisis dan formulasi kebijakan yang matang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, di mana kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan-tujuan tersebut dengan tindakan operasional yang dilakukan.
4. Perencanaan yang cermat melibatkan pengambilan keputusan saat ini terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi untuk masa depannya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan skenario yang mungkin terjadi.
5. Penyusunan program yang sesuai membutuhkan perencanaan yang komprehensif yang diartikulasikan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Tanpa itu, pelaksanaan program bisa kehilangan arah dan panduan yang diperlukan untuk menjalankan tindakan dan pekerjaan dengan efektif.
6. Salah satu penanda efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif, yang bergantung pada ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

kerja yang diberikan oleh organisasi.

7. Implementasi yang optimal dan hemat sumber daya merupakan faktor kunci keberhasilan. Meskipun suatu program telah dirancang dengan sangat baik, tanpa eksekusi yang efektif dan efisien, organisasi akan gagal mencapai targetnya. Dengan demikian, pelaksanaan program yang tepat guna menjadi jembatan vital yang menghubungkan organisasi dengan pencapaian tujuannya.
8. Mengingat ketidaksempurnaan manusia, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, penting untuk menerapkan sistem monitoring dan kontrol yang tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memberikan kesempatan belajar dan pengembangan diri bagi anggota organisasi. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan sambil mempertahankan efisiensi operasional.

Menurut Richard M. Steers (1980), ukuran efektivitas organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pencapaian Tujuan: Pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan tahapan dalam mencapai tujuan akhir. Ini mencakup aspek waktu dan target yang harus dicapai secara konkret.
2. Integrasi: Integrasi mengukur kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan berbagai organisasi lain. Hal ini terkait dengan proses sosialisasi di dalam organisasi
3. Adaptasi: Adaptasi adalah Penyesuaian diri mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyelaraskan diri dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

Tingkat penyesuaian ini dapat diukur melalui efektivitas proses rekrutmen dan alokasi sumber daya manusia. Kemampuan organisasi dalam memilih dan menempatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan mencerminkan tingkat adaptabilitasnya terhadap perubahan dan tuntutan eksternal.

Dengan demikian, Steers menekankan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya tergantung pada pencapaian tujuan, tetapi juga pada integrasi internal organisasi dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas diukur dengan membandingkan masukan (input) dan keluaran (output). Di samping itu, ukuran efektivitas juga mencakup tingkat kepuasan, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, dan intensitas interaksi yang tinggi, yang mencerminkan tingginya rasa kepemilikan di antara anggota organisasi.

2.2.1.3 Faktor-Faktor Efektivitas

Menurut Makmur (2011), efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk secara efisien dan efektif menjalankan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, program, atau entitas serupa tanpa mengalami tekanan atau ketegangan selama pelaksanaannya”. Makmur (2011) juga mengidentifikasi delapan kriteria atau indikator untuk mengukur efektivitas, yaitu tepat waktu, tepat biaya, akurasi pengukuran, kecermatan dalam pemilihan, keakuratan berpikir, ketepatan dalam pemberian perintah, ketepatan dalam menetapkan tujuan, dan pencapaian target dengan tepat.

Suranto dalam Tangkilisan (2002) mengemukakan bahwa elemen-elemen yang berperan dalam menentukan tingkat efektivitas dapat dikelompokkan ke

dalam dua klasifikasi utama: aspek-aspek yang berasal dari dalam organisasi (internal) dan aspek-aspek yang bersumber dari luar organisasi (eksternal). Pembagian ini memungkinkan analisis yang lebih terstruktur terhadap berbagai pengaruh yang membentuk kinerja dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya:

1. Faktor Internal: Ini meliputi kerjasama di dalam sebuah program, baik antara individu dengan individu maupun antara individu dengan instansi lain. Kerjasama yang baik di sini dapat mempercepat pencapaian tujuan karena adanya hubungan simbiosis yang efektif.
2. Faktor Eksternal: Ini mencakup hubungan pertukaran dengan berbagai lembaga dan keterlibatan dengan tujuan yang bersangkutan untuk mendapatkan dukungan dan mengatasi hambatan. Faktor ini menyoroti pentingnya hubungan dengan pihak luar yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, Suranto menekankan bahwa baik faktor internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas suatu program atau organisasi. Faktor-faktor efektivitas dapat dibedakan ke beberapa jenis. Beberapa ahli memiliki pendapatnya tersendiri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Pendapat menurut Duncan yang dikutip oleh Streers (1980:11) yaitu :

Pencapaian tujuan merujuk pada keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan akhir dari suatu program. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir lebih dapat dipastikan, hal ini perlu dijadikan landasan dalam suatu proses karena hal tersebut dapat menunjukkan apakah tujuan program telah berjalan secara optimal atau tidak. Pencapaian tujuan dapat dinilai melalui beberapa indikator, seperti jangka waktu, sasaran, dan dasar hukum. Integrasi merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk berinteraksi, membangun kesepakatan bersama, dan berkomunikasi dengan organisasi lain. Indikator integrasi termasuk prosedur dan proses sosialisasi yang diterapkan. Adaptasi adalah proses di mana individu atau organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan

lingkungan sekitarnya. Tingkat keberhasilan dalam penyesuaian ini dapat diukur melalui dua indikator utama: pertama, peningkatan kapasitas dan keterampilan, dan kedua, ketersediaan serta kualitas infrastruktur pendukung yang dibutuhkan. Kedua aspek ini mencerminkan kemampuan organisasi atau individu dalam merespons dan mengakomodasi dinamika lingkungan eksternal.

Selanjutnya ada kesamaan pendapat Duncan mengenai faktor-faktor efektivitas yang senada dengan Teori Sutrisno (2007) yang menyatakan bahwa terdapat indikator mengenai ukuran suatu efektivitas program didalam suatu organisasi untuk mengetahui sejauh mana keefektifan suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan sub variabel-variabel sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap program. Indikator pemahaman program menjelaskan tentang cara pelaksanaan program agar dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Hal ini penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program, karena penting bahwa program yang dilaksanakan dapat dieksekusi dengan cepat dan efisien.
2. Ketepatan sasaran. Indikator ini mencerminkan efektivitas suatu program dengan mengevaluasi kesesuaian program terhadap aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dianggap berhasil jika dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan sejak awal.
3. Ketepatan waktu. Pentingnya menjalankan kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam suatu proses kegiatan menandakan efektivitasnya. Pelaksanaan yang tepat waktu menunjukkan bahwa program tersebut berjalan efektif sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
4. Tercapainya Tujuan. Indikator ini mengukur efektivitas program dengan menilai apakah tujuan organisasi atau program dapat dicapai melalui

pelaksanaan program yang telah dilaksanakan.

5. Perubahan Nyata. Perubahan nyata adalah salah satu indikator efektivitas program yang mengukur apakah perencanaan yang sudah dirancang pada program dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

2.2.2 Kajian tentang Program

2.2.2.1 Pengertian Program

Program dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan diarahkan pada satu atau lebih tujuan tertentu. Wholey et al. (1994:41) menggambarkan program sebagai “Seperangkat sumber daya dan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama.” Suharsimi Arikunto (2012:291) menjelaskan bahwa program adalah kegiatan yang direncanakan secara cermat. Sementara itu, menurut Suharto (2009:120), program merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai perubahan tertentu yang terkait dengan sasaran kelompok tertentu. Sudjana (dalam Mahmudi & Saputra, 2018:64) mengartikan program sebagai kegiatan terencana yang meliputi maksud, tujuan, isi, serta proses pelaksanaannya dengan menggunakan waktu, anggaran, sarana, dan sumber daya lainnya.

Arikunto dan Jabar dalam Munthe Ashiong, (2015:5) membedakan pengertian program secara khusus dan umum. Secara keseluruhan, program serangkaian rencana terstruktur yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh individu atau lembaga tertentu untuk mencapai tujuan.

2.2.2.2 Macam-Macam Program

Jenis atau ragam program dapat bervariasi dalam berbagai aspek. Arikunto (1998:1-2) menjelaskan dalam bukunya bahwa jenis program dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:

1. Tujuan: Aspek ini mencakup mencari keuntungan tertentu, diukur dari seberapa besar manfaat yang diberikan oleh program tersebut, atau jika program itu bersifat sukarela, ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang diperoleh orang lain.
2. Jenis: Termasuk dalam kategori ini adalah program Pendidikan, pemberdayaan, Bersama, dan Kemasyarakatan. Klasifikasi ini tergantung pada pengertian yang dimaksud.
3. Waktu: Terdiri dari program jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Keluasan: Meliputi program dengan cakupan sempit dan luas.
5. Pelaksanaan: Termasuk program skala kecil dan skala besar.
6. Sifat program: Ada program yang penting dan yang tidak penting

2.2.2.3 Tujuan Program

Menurut Arikunto & Jabar (2018) “Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai pihak, berisi kebijakan atau tujuan tertentu, dan serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk dapat diimplementasikan di lapangan.” Suatu rancangan program tentu memiliki tujuan yang jelas baik dari segi jenis, waktu, maupun sasarannya. Tujuan program merujuk pada maksud atau sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan (Arikunto, 1998:35). Dari penjelasan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa tujuan program merupakan indikator kelayakan rancangan program agar dapat direalisasikan.

2.2.3 Kajian Tentang Pembinaan

2.2.3.1 Pengertian Pembinaan

Menurut Depdikbud (2002:152) Pembinaan adalah proses atau tindakan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ini berarti pembinaan mengubah sesuatu sehingga memperoleh nilai-nilai yang lebih tinggi mencakup upaya pembinaan yang melibatkan konsep perbaikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang lebih baik dan bermanfaat, dengan tujuan agar efektif dalam memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas.

Pengertian lainnya mengenai pembinaan adalah, menurut Suwandono (1986:36), sebagai berikut:

Berbagai upaya termasuk dalam rentang kegiatan yang saling terkait, seperti pemeliharaan, penyelamatan, pengolahan, serta bimbingan, pengarahan, penelitian, eksplorasi, pencatatan, dan peningkatan kualitas. Kegiatan-kegiatan ini terjalin secara berkelanjutan dan saling mendukung.

Menurut Mitha Thoha (2008) “Pembinaan adalah tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang bertujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Dalam konteks ini, pembinaan menunjukkan kemajuan, pertumbuhan, evolusi, atau peningkatan atas berbagai kemungkinan atau aspek tertentu”. Definisi pembinaan terdiri dari dua unsur: (1) Pembinaan dapat berupa tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan (2) Pembinaan menunjukkan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan sesuatu. Sedangkan Pengertian lain mengenai Pembinaan Menurut Mangunhardjana di dalam (Ramadhan et al., 2019:114) sebagai berikut :

Pembinaan adalah proses meninggalkan hal-hal lama dan mempelajari yang baru, bertujuan membantu orang meningkatkan dan memperluas pengetahuan mereka. Ini melibatkan pelepasan konsep usang dan adopsi wawasan baru untuk pengembangan diri yang efektif serta keterampilannya untuk memperoleh wawasan baru dan keterampilan untuk mencapai tujuan hidup secara efektif.

Menurut Widjaja (1988) Pembinaan adalah proses atau pengembangan yang melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dengan pendirian, membutuhkan pemeliharaan pertumbuhan, serta melibatkan upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan yang berkelanjutan.

2.2.3.2 Tujuan Pembinaan

Pembinaan sebagai sarana pemberian dan pembelajaran untuk menghasilkan hasil pembinaan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh Pembina sangatlah penting, apalagi bila pembinaan melibatkan orang-orang yang kompleks dengan harapan dan aspirasi yang berbeda-beda. Pembinaan membantu anda memahami apa yang benar dan apa yang salah (Rustanto, 2015:7).

Selanjutnya Hardjono (dalam Rustanto, 2015:7-8) menjelaskan bahwa pembinaan memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mengkomunikasikan informasi serta membagikan pengetahuan.
2. Menginisiasi transformasi dan perkembangan dalam sikap.
3. Melakukan latihan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan.

2.2.4 Kajian tentang Pelayanan Sosial

2.2.4.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Menurut KBBI mendefinisikan pelayanan sebagai usaha membantu atau memenuhi kebutuhan pihak lain. Dalam konteks sosial, pelayanan merujuk pada bantuan yang diberikan pada periode tertentu, bertujuan memperbaiki interaksi

antara individu atau kelompok dengan lingkungan sosialnya. Fokusnya adalah pada peningkatan hubungan sosial dan penyesuaian diri dalam masyarakat.

Menurut Dolgoff dan Feldstein (2003) “Pelayanan sosial dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial”. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai pelayanan sosial di masyarakat yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi masalah mereka, sehingga dapat tercipta keberfungsian sosial baik secara individu maupun kelompok. Pelayanan menurut Huraerah (2011) adalah :

Pelayanan sosial merupakan aktivitas terstruktur yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan karena keluarga mereka tidak mampu menjalankan fungsi mereka dengan baik. Kegiatan ini mencakup pelayanan untuk anak-anak (termasuk balita dan remaja) serta orang lanjut usia yang terlantar atau mengalami berbagai jenis cacat.

Menurut Ibrahim (2010:11), pelayanan sosial adalah upaya menangani masalah sosial dan memberi bantuan pada individu atau kelompok yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam arti luas, ini merupakan bagian dari kebijakan sosial, meliputi semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

Edi Suharto (2004) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai kapasitas individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, bersama dengan sistem dan jaringan sosial mereka, untuk memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial, dan menghadapi berbagai tekanan hidup. Ini mencakup kemampuan mengatasi tantangan dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Mengacu pada pendapat Romanyshyn yang dikutip dalam karya Fahrudin (2012:51), definisi pelayanan sosial diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki,

menjaga, dan meningkatkan fungsi sosial individu dan keluarga melalui dua strategi: pertama, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya sosial yang mendukung; kedua, menerapkan metode yang memperkuat kemampuan individu dan keluarga dalam menghadapi tekanan dan tuntutan kehidupan sosial sehari-hari.

2.2.4.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Menurut Adi Fahrudin (2012), fungsi-fungsi pelayanan sosial mencakup beberapa aspek utama yaitu

1. Pelayanan ini bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam memahami dan mengembangkan keterampilan sosial mereka serta meningkatkan integrasi mereka dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi: Meliputi layanan yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah kesehatan mental atau fisik, memberikan dukungan dan perawatan agar mereka dapat pulih dan berfungsi kembali secara optimal.
3. Perlindungan sosial dan perawatan pengganti meliputi usaha untuk melindungi individu atau kelompok yang rentan dari berbagai risiko sosial, serta menyediakan penggantian perawatan dan dukungan jika dibutuhkan.
4. Pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat: Menyediakan bantuan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta nasihat untuk mengatasi berbagai masalah atau kebutuhan yang dihadapi.

Pelayanan sosial memiliki peran yang penting dalam mendukung kebutuhan dan kesejahteraan individu serta kelompok dalam masyarakat.

Richard M Titmuus, seperti dikutip oleh Muhidin (1992:43), memaparkan fungsi-fungsi pelayanan sosial dari sudut pandang masyarakat sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan atau fasilitas yang bertujuan meningkatkan taraf hidup individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan dampak positif baik untuk saat ini maupun masa depan.
2. Penyediaan layanan atau fasilitas yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan tantangan yang berpotensi mengganggu atau membahayakan kesejahteraan mereka.
3. Penyediaan layanan atau bantuan sebagai alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengakses pelayanan sosial dari sumber-sumber lainnya, berfungsi sebagai program pengganti atau kompensasi.
4. Pelayanan atau keuntungan berupa bantuan atau manfaat yang ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran kemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi publik.

Fungsi-fungsi ini menunjukkan peran penting pelayanan sosial dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan potensi manusia, dan mengelola perubahan sosial serta sumber daya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.4.3 Pelayanan Sosial Berbasis Panti

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah suatu organisasi atau perkumpulan sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. LKS ini bertugas menyelenggarakan berbagai program dan

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Organisasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa layanan kesejahteraan sosial dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dan dukungan sosial. LKS ini dapat dibentuk oleh masyarakat, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak. Fungsi utama LKS adalah untuk memberikan bantuan dan layanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, serta berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial di masyarakat. LKS memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan tujuan membantu individu atau kelompok yang membutuhkan serta mempromosikan kesejahteraan sosial secara umum di masyarakat.

Secara empiris, lembaga pelayanan sosial memiliki peran yang signifikan dalam memberikan layanan kepada individu dengan berbagai kebutuhan sosial. Menurut Sukoco (1997), dalam konteks pelayanan berbasis panti, terdapat beragam jenis layanan sosial yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan klien. Layanan-layanan ini tidak hanya mencakup bantuan langsung seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, rehabilitasi, dan reintegrasi ke masyarakat. Dengan demikian, lembaga pelayanan sosial berperan dalam mendukung kesejahteraan sosial klien-kliennya melalui berbagai bentuk layanan yang komprehensif dan holistik berbasis panti adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan pengasramaan: Penyediaan tempat tinggal sementara bagi klien, memastikan mereka memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk tinggal selama mereka berada di panti.
2. Pelayanan kebutuhan pangan: Pemberian makanan dan minuman dengan berbagai menu yang telah ditentukan untuk memastikan kebutuhan gizi klien terpenuhi dengan baik, sehingga kesehatan mereka tetap terjaga.
3. Pelayanan konseling: Bimbingan yang disediakan bertujuan untuk membantu klien meningkatkan kemauan dan keterampilan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, memenuhi kebutuhan pribadi mereka, serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi sehari-hari.
4. Pelayanan kesehatan: Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh tenaga medis untuk memantau dan menjaga kondisi kesehatan klien secara keseluruhan.
5. Pelayanan pendidikan: Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan mereka melalui berbagai program pendidikan yang tersedia.
6. Pelayanan keterampilan: Bimbingan dalam mengembangkan keterampilan praktis, seperti pembuatan kerajinan tangan, yang dapat berguna bagi klien dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai bekal untuk masa depan mereka.
7. Pelayanan bimbingan mental, yang melibatkan aspek keagamaan dengan mendukung aktivitas keagamaan klien dan mengikuti ceramah keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

8. Pelayanan hiburan, yang bertujuan untuk memberikan kegembiraan melalui kegiatan seperti permainan, musik, dan media lainnya.

Ini menunjukkan bahwa lembaga pelayanan sosial memiliki peran penting dalam memberikan dukungan komprehensif kepada kliennya, tidak hanya dalam aspek fisik dan materi, tetapi juga dalam aspek psikologis, sosial, dan spiritual.

2.2.5 Kajian tentang Pekerjaan Sosial

2.2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial menurut Soetarso (dalam Huraerah, 2011:39) menjelaskan bahwa:

Pekerja sosial merupakan seorang profesional yang memberikan bantuan dengan memperkuat interaksi sosial yang saling terkait. Fokus utama dari profesinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, atau masyarakat secara menyeluruh. Pekerja sosial berusaha menciptakan harmoni sosial yang mendukung pemulihan dan peningkatan fungsionalitas sosial individu, sehingga mereka dapat berperan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Pada tahun 2019, disampaikan bahwa pekerja sosial profesional adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta dengan kualifikasi yang memadai serta melaksanakan profesi pekerja sosial sesuai standar yang ditetapkan. Mereka mengikuti praktik yang diatur secara ketat, mencakup penyediaan bantuan profesional yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan diawasi dengan baik. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mencegah munculnya disfungsi sosial pada berbagai tingkat, termasuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Pekerja sosial profesional ini berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan etika, serta berusaha menciptakan

dampak positif yang berkelanjutan dalam komunitas yang mereka layani. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada solusi, mereka membantu mengatasi berbagai masalah sosial dan mempromosikan kesejahteraan sosial secara luas.

Menurut Soetarso (sebagaimana dikutip dalam Huraerah, 2011:39), pekerjaan sosial sebagai profesi melibatkan pemberian bantuan dengan memperkuat interaksi sosial yang saling terhubung satu sama lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, atau masyarakat secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat secara umum dengan memulihkan fungsi sosial dari setiap individu dalam harmoni.

Kegiatan profesional yang dilakukan oleh pekerja sosial didasarkan pada penerapan praktik profesional yang bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, sesuai dengan pandangan dari Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) yang dikutip dalam Fahrudin (2012:60) sebagai berikut :

Social work involves providing professional assistance to individuals, groups, or communities to improve or restore their ability to function socially, while creating social conditions that support their goals. Social work practice includes the application of professional social work values, principles, and methods to achieve a variety of goals. This includes helping individuals access essential services, providing psychological counseling and therapy to individuals, families, and groups, and supporting communities or groups in providing or improving social and health services. Social work also involves participation in relevant legislative processes. To practice social work effectively requires a deep understanding of human development and behavior, as well as the dynamics that exist among social, economic and cultural institutions.

Pekerjaan sosial merupakan bidang profesional yang berupaya memberdayakan individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau

memulihkan kemampuan bersosialisasi mereka, sekaligus menciptakan iklim sosial yang mendukung. Profesi ini melaksanakan serangkaian kegiatan secara profesional dengan pendekatan holistik dan metodis. Pekerjaan sosial menerapkan sejumlah nilai, prinsip, dan metode spesifik untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan. Kegiatannya meliputi pemberian bantuan langsung kepada individu yang memerlukan, penyediaan konsultasi dan terapi kejiwaan bagi perorangan, keluarga, dan kelompok, serta dukungan terhadap komunitas dalam pengadaan atau peningkatan layanan sosial dan kesehatan. Pekerja sosial juga terlibat dalam proses pembuatan undang-undang terkait, memastikan kebijakan pemerintah mendukung kesejahteraan sosial serta hak-hak individu dan kelompok. Pekerja sosial bekerja di berbagai konteks, mulai dari lingkungan perorangan hingga institusi besar, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan komunitas lokal. Mereka berinteraksi dengan klien dari berbagai latar belakang dan berusaha memahami serta mengatasi masalah sosial yang kompleks. Dengan pendekatan yang berorientasi pada solusi dan berbasis bukti, pekerja sosial berupaya menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan klien mereka dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pekerjaan sosial adalah profesi yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial, membantu individu dan kelompok untuk mencapai potensi maksimal mereka, serta mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Praktik pekerjaan sosial membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek seperti perkembangan dan perilaku manusia, struktur sosial, ekonomi, dan budaya, serta interaksi kompleks antara faktor-faktor

tersebut. Dengan pemahaman ini, pekerja sosial dapat membantu individu mengatasi tantangan yang mereka hadapi, menghubungkan mereka dengan sistem dan jaringan sosial yang mendukung, serta meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga sosial dalam memberikan layanan yang berkualitas. Selain itu, pekerja sosial berperan dalam merancang dan mengembangkan perangkat hukum serta regulasi yang mendukung terciptanya kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, pekerjaan sosial melibatkan berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Layanan ini mencakup upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko dan tantangan, memberikan kompensasi bagi individu yang tidak dapat memperoleh layanan sosial dari sumber lain, serta investasi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

2.2.5.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Menurut Suharto (2009:5) dalam Dubois dan Milley, pekerjaan sosial memiliki tujuan dan fokus tertentu dalam melaksanakan praktiknya untuk membantu mengembalikan keberfungsian sosial. Strategi-strategi pekerjaan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas individu dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan.
2. Menghubungkan individu dengan jaringan sosial dan sistem yang dapat memudahkan akses mereka ke berbagai sumber daya, layanan, dan kesempatan yang ada.
3. Memperbaiki kinerja lembaga-lembaga sosial untuk dapat menyediakan layanan sosial yang efektif, bermutu, dan berempati.
4. Menyusun serta mengembangkan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung pencapaian kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Menurut Fahrudin (2012:66) yang mengutip NASW, fokus pekerjaan sosial adalah mengembalikan keberfungsian sosial, sehingga praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapabilitas individu untuk menangani masalah, mengatasi tantangan, dan mengembangkan potensi diri mereka.
2. Menghubungkan individu dengan sistem-sistem yang menyediakan sumber daya, layanan, dan peluang yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari sistem-sistem yang memberikan sumber daya dan layanan kepada individu.
4. Mengembangkan serta memperbaiki kebijakan-kebijakan sosial yang relevan.

Menurut Zastrow dalam Fahrudin (2012: 67), CSWE (Council on Social Work Education) menambahkan empat tujuan tambahan dari praktik pekerjaan sosial:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan sosial lainnya, fokus pada program dan layanan yang memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.
2. Melakukan advokasi untuk kebijakan, layanan, dan sumber daya melalui tindakan sosial dan politik untuk memperkuat keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menerapkan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan dalam praktik pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektivitas intervensi.
4. Menyesuaikan praktik pekerjaan sosial dengan berbagai konteks budaya untuk memastikan relevansi dan efektivitas layanan yang disediakan.

Menurut CSWE, praktek pekerjaan sosial tidak hanya terbatas pada empat tujuan tersebut, tetapi juga menekankan perlunya pengembangan profesionalisme bagi pekerja sosial untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani berbagai kasus yang dihadapi klien mereka

2.2.5.3 Fungsi Pekerjaan Sosial

Menurut Siporin dalam Huraerah (2011:40), fungsi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Membangun, mengelola, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi secara memadai.
2. Memastikan bahwa standar substansi dan kesehatan berfungsi dengan efektif sesuai dengan posisi dan fungsi individu dalam struktur sosial.
3. Mendorong serta memperkuat ketertiban sosial serta struktur institusi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama.

Iskandar (2013:30) mengemukakan mengenai pekerja sosial adalah sebagai berikut.

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan dan memastikan kesejahteraan sosial, baik untuk perseorangan maupun komunitas. Penerapan fungsi-fungsi ini secara tepat sangat krusial guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan benar, pekerja sosial dapat mencapai tujuan mereka secara efektif dan memberikan bantuan yang optimal kepada individu serta kelompok yang membutuhkan.

Fungsi pekerjaan sosial menurut Sukoco (1995: 20) mencakup lima aspek utama. Pekerja sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah pribadi mereka. Mereka juga membantu individu dalam berinteraksi dengan sistem sumber daya seperti pemerintah daerah, lembaga sosial yang menyediakan berbagai layanan, dan pengusaha untuk meningkatkan kebutuhan yang diperlukan. Tujuan lainnya adalah untuk memfasilitasi interaksi individu dengan sistem sumber daya, mempengaruhi kebijakan sosial, serta pemerataan distribusi sumber daya material untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang merata di berbagai daerah.

2.2.5.4 Peran Pekerjaan Sosial

Profesi pekerjaan sosial berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung perorangan, unit keluarga, dan komunitas dalam proses pemulihan serta peningkatan kapasitas mereka untuk berinteraksi sosial secara efektif, dengan tujuan akhir mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera. Cakupan pekerjaan sosial tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan kepada masyarakat, namun juga mencakup pelaksanaan berbagai fungsi khusus yang melekat pada profesi ini. Menurut Sukoco (1995: 22-27), peran pekerjaan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam perannya sebagai katalisator perubahan, seorang pekerja sosial memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang tersedia bagi individu, kelompok, dan komunitas. Mereka juga membantu dalam proses pengenalan masalah dan peningkatan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa kebutuhan klien dapat terpenuhi melalui pengembangan kapasitas mereka sendiri dalam menyelesaikan persoalan.
2. Sebagai peran sebagai perantara (*broker*), dalam kapasitasnya sebagai penghubung, pekerja sosial berperan menjembatani komunikasi antara pihak yang membutuhkan bantuan (baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat luas) dengan berbagai lembaga penyedia layanan. Lembaga-lembaga ini bisa mencakup Dinas Sosial, organisasi pemberdayaan masyarakat, hingga instansi pemerintah. Fungsi utama dari peran perantara ini adalah memastikan bahwa mereka yang memerlukan dukungan atau layanan tertentu dapat mengaksesnya

dengan efektif.

3. Sebagai pendidik (*educator*), Seorang praktisi pekerjaan sosial dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Mereka harus bisa menyampaikan pesan dengan akurat, jelas, dan dalam bahasa yang mudah dicerna oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran intervensi, baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Kejelasan dan ketepatan informasi ini penting untuk mendukung proses perubahan yang diharapkan.
4. Sebagai tenaga ahli (*expert*), Praktisi pekerjaan sosial berperan sebagai sumber wawasan dan pengetahuan bagi klien mereka. Mereka menyediakan berbagai bentuk bantuan informatif, termasuk rekomendasi, nasihat, dan data pendukung, yang mencakup beragam aspek kehidupan. Layanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari individu, kelompok, atau komunitas yang mereka tangani.
5. Sebagai perencana sosial (*social planner*), Praktisi pekerjaan sosial melakukan pengumpulan informasi terkait permasalahan sosial yang dialami oleh klien mereka, baik itu perseorangan, kelompok, maupun masyarakat luas. Mereka kemudian melakukan analisis mendalam terhadap data tersebut. Berdasarkan hasil analisis, pekerja sosial menawarkan berbagai opsi penanganan yang logis dan dapat diterapkan. Tujuannya adalah membantu klien memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.
6. Sebagai fasilitator, Praktisi pekerjaan sosial berkomitmen untuk memajukan masyarakat dengan mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki,

termasuk waktu, ide, dan fasilitas yang dibutuhkan. Fungsi mereka adalah memperlancar transformasi pada tingkat individu, kelompok, maupun komunitas yang lebih luas. Dalam peran ini, pekerja sosial bertindak sebagai pemicu perubahan, secara aktif mendorong dan memfasilitasi setiap tahapan dalam proses pengembangan masyarakat.

Peranan pekerjaan sosial, sebagaimana yang ditulis oleh Zastrow dalam Huraerah (2011: 163), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai *Enabler*, Praktisi pekerjaan sosial berperan membantu anggota masyarakat untuk lebih memahami dan mengungkapkan kebutuhan serta tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, pekerja sosial juga mendukung pengembangan kapasitas masyarakat dalam menangani permasalahan mereka sendiri dengan cara yang lebih tepat guna. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah dan mencari solusi yang efektif secara mandiri.
2. Sebagai *Broker*, Praktisi pekerjaan sosial bertindak sebagai penghubung vital, memfasilitasi akses bagi individu dan kelompok yang memerlukan dukungan ke berbagai sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menjembatani kesenjangan antara pihak yang membutuhkan bantuan dengan penyedia layanan masyarakat, memastikan bahwa bantuan yang diperlukan dapat diakses secara efektif.
3. Sebagai *Expert*, Praktisi pekerjaan sosial berperan sebagai sumber pengetahuan yang komprehensif. Mereka menyediakan berbagai macam informasi dan rekomendasi yang mencakup beragam aspek kehidupan. Layanan konsultasi

ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari individu, kelompok, atau komunitas yang mereka layani, memberikan wawasan dan panduan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan.

4. Sebagai *Social Planner*, pekerja sosial mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah sosial, menganalisisnya, dan menyusun alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut.
5. Sebagai *Advocate*, pekerja sosial bertindak sebagai perwakilan aktif yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka.
6. Sebagai *The Activist*, pekerja sosial terlibat dalam melakukan perubahan mendasar yang bertujuan untuk mengalihkan sumber daya atau kekuasaan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dalam upaya meningkatkan kondisi mereka secara keseluruhan.

Menurut pendapat Zastrow (1982: 534-537), peran-peran pekerjaan sosial memiliki tujuh fokus utama yang bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan individu serta komunitas, dengan fokus khusus pada mereka yang berada dalam kondisi kurang menguntungkan. Tanggung jawab utama praktisi pekerjaan sosial meliputi penyediaan akses yang adil terhadap layanan sosial, pemenuhan kebutuhan fisik maupun non-fisik, serta penjaminan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fundamental lainnya bagi klien mereka. Peran ini bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Peran-peran pekerjaan sosial tersebut mencakup *advocate* dan *activist*, yang memiliki peran penting dalam membela hak-hak dan kepentingan masyarakat yang kurang beruntung. *Advocate*

bertindak sebagai perwakilan yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tersebut, sementara *activist* terlibat dalam upaya perubahan mendasar yang bertujuan untuk mengalihkan sumber daya atau kekuasaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan lebih.

2.2.5.5 Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial

Metode dan teknik dalam pekerjaan sosial adalah alat dan pendekatan yang digunakan oleh pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok, dan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Ruang lingkup mikro, mezzo, dan makro metode pekerjaan sosial termasuk (Fahrudin, 2014) yang menjelaskan bahwa secara historis pekerja sosial memiliki tiga pendekatan utama dan tiga metode pembantu. Metode pokok tersebut adalah pekerjaan kasus sosial, pekerjaan sosial, pekerjaan kelompok, dan pengorganisasian komunitas dan pembangunan komunitas. Di sisi lain, Administrasi pekerjaan sosial, tindakan sosial, dan sosial adalah metode pembantunya, penelitian pekerjaan. Ada tiga kelompok utama pendekatan untuk pekerjaan sosial, serta Pekerjaan sosial dibantu dengan tiga cara. Berikut adalah beberapa metode dan teknik yang umum digunakan dalam pekerjaan sosial.

1. *Social Case Work* (Praktek Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga)

Social case work adalah suatu proses yang dipergunakan oleh badan-badan sosial (human welfare agancies) tertentu untuk membantu individu-individu agar mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan sosial mereka secara lebih efektif (Aipassa,2011).

2. *Social Group Work* (Praktek Pekerjaan Sosial dengan Kelompok)

Menurut National of Social Work, pekerjaan kelompok sosial (praktek pekerjaan sosial dengan kelompok) adalah suatu pelayanan kepada kelompok dengan tujuan utama membantu anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka (sosial adjusment) dan membantu kelompok mencapai tujuan yang disepakati oleh masyarakat. Menurut Skidmore & Thakery (1991), pekerjaan kelompok sosial adalah suatu metode bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh masyarakat.

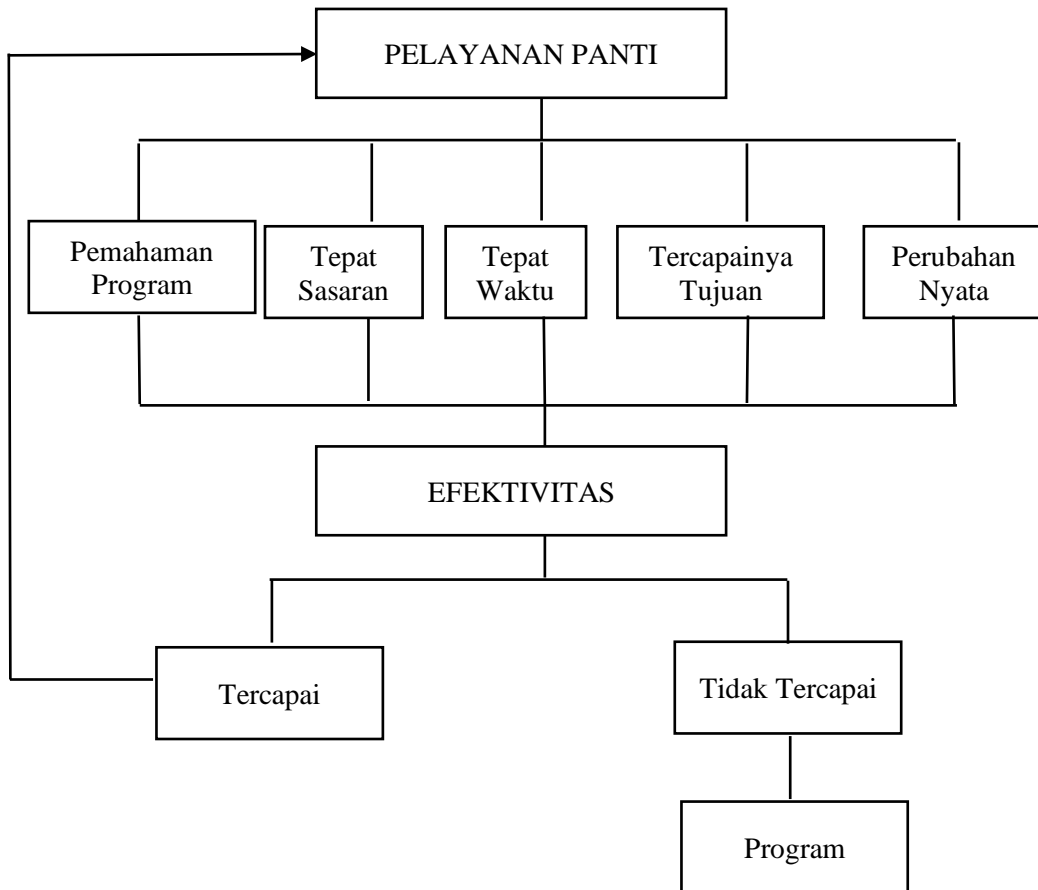
3. *Community Organization/Community Development* (Praktek Pekerjaan Sosial dengan Komunitas dan Masyarakat)

Menurut Arthur Dunham (1958) dalam buku Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat yang ditulis oleh Aprina dan Neneng Siti Lathifa (2016:2) kerja komunitas adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu dan suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan dalam bidang kegiatan tertentu atau suatu masyarakat tertentu.

2.3 Kerangka Penelitian

Struktur konseptual dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai peta pemikiran yang menggambarkan alur penalaran yang diaplikasikan untuk menghadapi dan menganalisis masalah yang menjadi fokus studi. Ini merupakan landasan logis yang mengarahkan cara peneliti merespons dan menginterpretasikan

isu-isu dalam penelitiannya. Dengan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2007) dengan 5 Indikator Efektivitas Dengan demikian, kerangka pemikiran ini membantu untuk memperjelas gambaran mengenai penelitian ini.pembinaan tersebut.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian
Sumber : Hasil Penelitian Peneliti 2024